

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesadaran global terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan telah mendorong transformasi mendasar dalam praktik bisnis di seluruh dunia (Sanjaya dkk., 2024). Industri konstruksi merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur namun juga berdampak signifikan terhadap lingkungan (Alexandra dkk., 2022). Dampak tersebut antara lain berupa penggunaan sumber daya alam yang tinggi, produksi limbah konstruksi, polusi udara, kebisingan, dan gangguan pada ekosistem di sekitar proyek. Sektor konstruksi, yang berkontribusi terhadap 40% konsumsi energi global dan 36% emisi CO₂ dunia (International Energy Agency, 2022), menjadi fokus utama dalam agenda pengurangan dampak lingkungan.

Keberadaan industri konstruksi memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional maupun internasional, antara lain melalui penyediaan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta penggerak roda perekonomian. Namun, di sisi lain, aktivitas konstruksi juga kerap menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, seperti meningkatnya emisi karbon, pencemaran limbah material, pelanggaran keselamatan kerja, serta praktik manajemen proyek yang kurang transparan. Ketidakseimbangan antara tujuan ekonomi dan tanggung jawab keberlanjutan ini dapat menurunkan kepercayaan publik serta memunculkan risiko reputasi bagi perusahaan konstruksi (Yanti, 2024).

Sebagai respon terhadap fenomena tersebut mendorong lahirnya konsep bangunan hijau (*green building*) sebagai pendekatan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor konstruksi. Isu tersebut diperkuat dengan adanya peningkatan suhu global yang diakibatkan efek rumah kaca, dan semakin meningkatnya populasi penduduk di dunia maupun di Indonesia sendiri menciptakan aktivitas yang membawa dampak pemanasan global dan juga pemborosan energi (Nasution dkk., 2024). *Green Building Council Indonesia* (GBCI) adalah lembaga yang berkembang dari *World Green Building Council* (WGBC) yang mengembangkan sistem penilaian untuk bangunan-bangunan

gedung yang ramah lingkungan yang dikenal dengan nama *Greenship*. Konsep *Greenship* dapat diterapkan pada berbagai jenis bangunan, termasuk gedung komersial seperti perkantoran maupun fasilitas di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.

Meskipun konsep bangunan hijau telah berkembang dan didukung oleh berbagai regulasi, implementasinya di Indonesia masih relatif terbatas. Pada tahun 2022, jumlah bangunan bersertifikat hijau di Indonesia baru mencapai sekitar 42 unit dan didominasi oleh sektor komersial serta pemerintahan. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, angka ini jauh tertinggal seperti pada Tiongkok telah memiliki 4.195 bangunan hijau di bawah *Green Building Evaluation Label* (GBEL), India sekitar 850 oleh *Indian Green Building Council* (IGBC), dan Malaysia juga mencatat ratusan proyek bersertifikat (GBCI, 2022). Selanjutnya data dari GBCI 2025 menunjukkan bahwa hingga awal tahun 2025 bangunan gedung yang memperoleh sertifikasi *Greenship* masih sangat kecil dibandingkan dengan total pembangunan konstruksi nasional, tercatat hanya sekitar 110 gedung yang telah tersertifikasi *Greenship* dan 153 gedung yang meraih sertifikat EDGE, meskipun pertumbuhan sektor konstruksi dan properti di Indonesia terus meningkat pesat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan konsep bangunan hijau pada proyek gedung masih belum optimal dan belum sebanding dengan jumlah pembangunan yang terus berkembang.

Ketua Umum GBCI menyampaikan bahwa lambatnya perkembangan bangunan hijau di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kendala teknis. Permasalahan utamanya juga terletak pada cara pandang, di mana masih banyak yang belum melihat bangunan hijau sebagai investasi jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan baik secara ekonomi maupun lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat serta pemberian insentif yang menarik agar semakin banyak bangunan yang terdorong untuk menerapkan standar keberlanjutan.

Seiring dengan upaya untuk mendorong percepatan penerapan bangunan hijau, berbagai pendekatan strategis mulai diadopsi oleh perusahaan konstruksi guna mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap tahapan proyek. Salah satu pendekatan yang berkembang dan banyak digunakan secara global adalah

konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG). ESG merupakan kerangka penilaian keberlanjutan yang berakar dari praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Husni dkk., 2025). ESG digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi/perusahaan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*). ESG sangat erat kaitannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). ESG juga merupakan bentuk nyata implementasi dari tujuan-tujuan SDGs.

Implementasi ESG dalam industri konstruksi tidak lagi menjadi pilihan optional, melainkan hal strategis *mandatory* yang didorong oleh tekanan para investor, regulasi pemerintah, dan *stakeholder*. Dalam perkembangannya, penerapan ESG tidak hanya menjadi isu global, tetapi juga mulai diterapkan secara nyata di Indonesia melalui berbagai kebijakan pemerintah. Komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan diperkuat melalui pengesahan *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, yang menegaskan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan menjaga kenaikan suhu bumi. Selain itu, arah pembangunan berkelanjutan di Indonesia juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor konstruksi yang menerapkan prinsip keberlanjutan. WIKA telah menetapkan kebijakan ini diwujudkan dalam berbagai program dan pedoman operasional yang diterapkan pada pelaksanaan proyek, termasuk melalui pendekatan *green construction*.. Komitmen tersebut diwujudkan dalam berbagai kebijakan keberlanjutan yang dipublikasikan melalui situs resmi perusahaan [WIKA ESG](#). Komitmen keberlanjutan WIKA tidak hanya tercermin dari kebijakan yang ditetapkan, tetapi juga dari strategi dan capaian kinerja ESG yang terstruktur dan terukur. WIKA telah menyusun *ESG Grand Roadmap 2024–2030* sebagai pedoman strategis dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh lini bisnis, dengan tujuan menjadi perusahaan konstruksi yang unggul dan menjadi *benchmark* dalam implementasi ESG di Indonesia.



Gambar 1. 1 Skor ESG WIKA 2025 (Sumber: www.sustainability.wika.co.id)

Berdasarkan penilaian S&P Global *Corporate Sustainability Assessment*, WIKA memperoleh skor 63/100 dan menempati peringkat #1 sektor konstruksi dan Engineering di Indonesia, peringkat #5 di Asia Pasifik, serta peringkat #13 dunia. WIKA juga mempertahankan peringkat ESG dari MSCI serta mencatat *ESG Risk Rating* sebesar 34,3 dari *Sustainalytics*, yang menjadi dasar dalam penguatan kinerja keberlanjutan ke depan. Dengan komitmen tersebut, WIKA dinilai representatif sebagai perusahaan konstruksi yang telah mengimplementasikan kebijakan ESG secara sistematis, sehingga relevan untuk dikaji lebih lanjut. Selain itu, WIKA juga memiliki pengalaman dalam mengerjakan proyek bangunan gedung yang mengarah pada penerapan konsep bangunan hijau, sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian dalam mengkaji keterkaitan antara implementasi ESG dan pencapaian kinerja bangunan hijau.

Penerapan kebijakan ESG pada proyek konstruksi bangunan gedung diharapkan dapat menjadi upaya sistematis dalam mendukung pencapaian standar bangunan hijau. Dengan demikian, implementasi kebijakan ESG berperan sebagai faktor pendukung dalam mendorong pencapaian kinerja bangunan hijau, yang dapat diukur menggunakan sistem penilaian seperti *Greenship*.

Salah satu proyek yang menerapkan kebijakan ESG WIKA tersebut adalah **Proyek Pembangunan Gedung Mandiri Financial Center PIK 2**. Proyek ini telah mengimplementasikan kebijakan ESG sebagai bagian dari pelaksanaan konstruksi dan juga sedang dalam upaya mencapai sertifikat *Greenship Platinum* dari GBCI, sehingga memiliki potensi untuk dianalisis dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja bangunan hijau.

Namun demikian, hingga saat ini **belum diketahui pengaruh implementasi kebijakan ESG terhadap tingkat pencapaian nilai bangunan hijau pada proyek konstruksi bangunan gedung**. Selain itu, meskipun kebijakan ESG telah diterapkan masih belum jelas sejauh mana implementasi kebijakan tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian nilai bangunan hijau yang terukur berdasarkan standar *GreenShip*. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan kebijakan keberlanjutan dengan hasil kinerja bangunan hijau di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara spesifik **menganalisis pengaruh implementasi kebijakan ESG sebagai faktor pendukung terhadap pencapaian poin bangunan hijau**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Implementasi kebijakan ESG WIKA telah mulai diterapkan pada proyek konstruksi bangunan gedung, namun belum diketahui sejauh mana implementasi tersebut mendukung pencapaian poin bangunan hijau
- b. Belum terdapat analisis yang mengkaji pengaruh implementasi kebijakan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap pencapaian poin bangunan hijau pada proyek konstruksi bangunan gedung.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, penelitian ini berikan batasan masalah, di antaranya:

- a. Objek penelitian ini dilakukan pada proyek Gedung Mandiri Financial Center PT Wijaya Karya Tbk. pada tahap konstruksi
- b. Lingkup Kebijakan ESG dalam penelitian ini terbatas pada kebijakan resmi yang diterapkan oleh PT Wijaya Karya Tbk sampai dengan bulan Desember 2025
- c. Penilaian tingkat pencapaian nilai bangunan hijau diukur menggunakan kategori dan indikator *GreenShip New Building v1.2*
- d. Kriteria dan indikator *GreenShip* yang digunakan terbatas pada tahap konstruksi

- e. Responden penelitian dibatasi pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek Gedung Mandiri Financial Center PT Wijaya Karya Tbk.

1.4 Rumusan Masalah

Terdapat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Apakah implementasi kebijakan ESG berpengaruh terhadap tingkat pencapaian nilai bangunan hijau pada proyek konstruksi bangunan gedung?”

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur mengenai hubungan antara implementasi kebijakan ESG dan kinerja *green building* di proyek konstruksi Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian akademik tentang praktik konstruksi berkelanjutan dan dapat mengembangkan kerangka analisis untuk evaluasi efektivitas kebijakan ESG.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi PT Wijaya Karya

Penelitian ini dapat memberikan masukan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan ESG dan menjadi acuan dalam meningkatkan capaian sertifikasi *GreenShip*.

2) Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan kurikulum terkait *sustainable construction*.

3) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam konteks nyata, sehingga meningkatkan kemampuan analisis, berpikir kritis, dan pemecahan masalah ilmiah.